

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Tahapan implemementasi tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah daerah di Kota Gorontalo telah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana seluruh tahapan ini dilakukan dengan cara persuasif sehingga tidak terjadi konflik atau interaksi yang merugikan kedua belah pihak dan revitalisasi PKL di Kota Gorontalo. Seluruh proses pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan perencanaan yang mempertimbangkan kepentingan dan tujuan, kebutuhan pemerintah dan PKL bahkan analisa pada proyeksi ekonomi PKL setelah dipindahkan.
2. Faktor penentu keberhasilan implemementasi tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah daerah di Kota Gorontalo yang dominan adalah komunikasi dan sosialisasi untuk meyakinkan dan menginformasikan berbagai hal positif dalam penataan PKL serta sumber daya yang berguna dalam terciptanya penataan PKL yang ideal dan memiliki manfaat nilai tambah ekonomi bagi PKL. Sementara faktor disposisi dan struktur birokrasi menjadi faktor pendukung untuk baiknya implementasi kebijakan penataan PKL di Kota Gorontalo.
3. Manfaat implemementasi tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah daerah di Kota Gorontalo cukup baik dimana untuk manfaat sosial

4. budaya dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat PKL, manfaat lingkungan diperoleh oleh pemerintah dan manfaat ekonomi diperoleh oleh masyarakat PKL. Manfaat sosial budaya dan lingkungan secara otomatis tercipta dengan adanya penataan PKL ini namun untuk manfaat ekonomi membutuhkan tindak lanjut dan berbagai intervensi pemerintah karena kadangkala hasil penjualan PKL menurun pada lokasi baru yang ditetapkan pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penting bagi pemerintah Kota Gorontalo untuk melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Gorontalo yang kemudian dibarengi dengan upaya promosi kawasan tersebut dengan berbagai produk yang dijual pada kawasan tersebut sehingga masyarakat PKL tidak merasa kehilangan atau penurunan pembeli karena lokasinya yang pada awal-awal penataan kurang dikunjungi oleh pelanggan atau penjualannya menurun. Kemudian penataan harus dibarengi dengan upaya penguatan ekonomi PKL baik dalam bentuk kemudahan akses perdagangan yang ideal maupun kemudahan dalam memperoleh kredit untuk pengembangan usaha.
2. Bagi para pedagang kaki lima, PKL harus mampu menjaga dan melaksanakan aturan yang telah disepakati bersama. Sementara itu, guna menjaga kunjungan konsumen, PKL harus mampu senantiasa mengadakan inovasiinovasi agar barang yang dijual lebih bervariasi, agar tidak senantiasa berorientasi terhadap

3. keuntungan sesaat, namun bertujuan untuk memperoleh keuntungan berkesinambungan.
4. Penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Gorontalo harusnya menjadi peluang bagi masyarakat sekitar dimana masyarakat sekitar harus mampu membaca peluang terkait dengan kurangnya fasilitas yang ada disana. Seperti halnya penyediaan toilet umum, lahan parkir yang memadai dan aman, merupakan contoh sebuah peluang bisnis yang mampu untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. (2003). *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik”* Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Abdul Wahab, Solichin. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: BumiAksara.
- Anggara, Sahya. (2018), *“Ekologi Administrasi”*, Jawa Barat, CV. Pustaka Setia
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta.
- GilangPermadi, (2007) *“Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini”* Jakarta: Yudhistira.
- Handoyo, Eko. (2012) *"Kebijakan Publik."* Semarang: WidyaKarya.
- Keban, T. Yeremias (2014), *“Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik”*, Yogyakarta, Gava Media.
- Nugroho D, Rianth. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*.
- Pasolong, (2016), *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie Kencana Inu, (2006), *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, RinekaCipta.
- Suwitri, Sri. (2008) *"Konsep dasar kebijakan publik."* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Santoso, Pandji, (2008), *“Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance”*, Refika Aditama, Bandung.
- Widodo, Joko. (2010). *“Analisis Kebijakan Publik”*. Malang: Bayu media.
- Winarno, Budi. (2005). *“Teori dan Proses Kebijakan Publik”*Yogyakarta:Media Pressindo (Anggota IKAPI).
- Perda Kota Gorontalo No 2 th 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

Jurnal penelitian

- Evita, Eka. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)." *Jurnal Administrasi Publik* 1.5 (2013): 943-952.

- Ramadhan, Adam. "Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)." *Unnes Law Journal* 4.1 (2015).
- Saleh, Linda, Ronny Gosal, and Frans Singkoh. "Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado." *Jurnal Eksekutif* 3.3 (2019).
- Evita, Eka. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)." *Jurnal Administrasi Publik* 1.5 (2013): 943-952.
- Irfan, M., Nia Kania Kurniawati, and TB Ace Hasan Syadzily. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 2.1 (2019).
- Swarsanas, Dema. *Implementasi Kebijakan Di Kecamatan Coblong Kota Bandung*. Diss. Perpustakaan, 2017.